



Research Article

## Pembiayaan Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Edupreneurship di Era Digital

Holilur Rahman<sup>1</sup>, Fina Alailah<sup>2</sup>, Ansisca<sup>3</sup>, Aishmah Naily Fauziyah<sup>4</sup>, Annatul Aini<sup>5</sup>

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [holafif@gmail.com](mailto:holafif@gmail.com)
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [finaalailah@gmail.com](mailto:finaalailah@gmail.com)
3. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [ansiscazyayadi@gmail.com](mailto:ansiscazyayadi@gmail.com)
4. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [nailyaishmahf@gmail.com](mailto:nailyaishmahf@gmail.com)
5. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [nbble12@gmail.com](mailto:nbble12@gmail.com)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Demagoggi: Journal of Social Sciences, Economics and Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 18, 2025

Revised : December 13, 2025

Accepted : January 15, 2026

Available online : February 19, 2026

**How to Cite:** Holilur Rahman, Fina Alailah, Ansisca, A., Aishmah Naily Fauziyah, & Annatul Aini. (2026). Financing Educational Institutions from the Perspective of Edupreneurship in the Digital Era. *Demagoggi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.61166/demagoggi.v4i1.141>

### Financing Educational Institutions from the Perspective of Edupreneurship in the Digital Era

**Abstract.** Digital transformation has brought significant changes in education governance, including accountability, transparency, and the effectiveness of financial management. However, many educational institutions still face obstacles such as reliance on manual systems, low digital literacy, and lack of use of financial technology. The edupreneurship approach offers solutions through funding innovation, diversification of funding sources, business unit development, and digital fundraising that can strengthen the sustainability of the institution. In this study, a descriptive qualitative method with a literature study was used to identify key concepts, research findings, and relevant financing models.

The results of the study show that education financing has a strategic role in ensuring the smooth operation of institutions, improving the quality of education services, strengthening planning and accountability, ensuring equitable access to education, optimizing philanthropy, and providing economic and social benefits for the community. In addition, the integration of digitalization and edupreneurship has proven to be able to encourage transparency while opening up innovative funding opportunities, although there are still challenges in the form of infrastructure gaps and limited human resources. This study confirms that there is a research gap in the integration of the two approaches, so a financing management model that combines the power of technology and entrepreneurial innovation is needed to support the sustainability of educational institutions in the digital era.

**Keywords:** Education Financing, Education Digitalization

**Abstrak.** Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pendidikan, termasuk akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan. Namun, banyak lembaga pendidikan masih menghadapi kendala seperti ketergantungan pada sistem manual, literasi digital yang rendah, dan kurangnya pemanfaatan teknologi finansial. Pendekatan edupreneurship menawarkan solusi melalui inovasi pendanaan, diversifikasi sumber dana, pembangunan unit usaha, dan digital fundraising yang dapat memperkuat keberlanjutan lembaga. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, temuan penelitian, serta model pembiayaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran operasional lembaga, meningkatkan mutu layanan pendidikan, memperkuat perencanaan dan akuntabilitas, menjamin akses pendidikan yang merata, mengoptimalkan filantropi, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Selain itu, integrasi digitalisasi dan edupreneurship terbukti mampu mendorong transparansi sekaligus membuka peluang pendanaan inovatif, meskipun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan infrastruktur dan keterbatasan SDM. Penelitian ini menegaskan adanya gap penelitian dalam integrasi kedua pendekatan tersebut, sehingga diperlukan model manajemen pembiayaan yang menggabungkan kekuatan teknologi dan inovasi kewirausahaan untuk mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan di era digital.

**Kata kunci:** Pembiayaan Pendidikan, Digitalisasi Pendidikan

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Transformasi digital tidak hanya mengubah metode pembelajaran dan sistem administrasi akademik, tetapi juga mempengaruhi cara lembaga pendidikan mengelola sumber daya dan mengembangkan strategi keberlanjutan.<sup>1</sup> Gregory Vial, mendefinisikan transformasi digital sebagai proses pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai baru bagi organisasi.<sup>2</sup> Dalam konteks pendidikan, digitalisasi menjadi momentum bagi lembaga pendidikan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akses layanan, serta mengembangkan model pembiayaan yang lebih adaptif dan inovatif. Hal ini sejalan dengan temuan Salsabila

---

<sup>1</sup> Donald Harris Sihotang, "Urgensi Manajemen Pendidikan dalam Menghadapi Era Digitalisasi," *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol.8, no. 3 (2025), 2536.

<sup>2</sup> Gregory Vial, "Understanding digital transformation: A review and a research agenda," *SI: Review issue*, vol.28, no. 2 (1 Juni 2019), 118.

& Karim yang menekankan urgensi inovasi pembiayaan Pendidikan Islam di Tengah tantangan ekonomi modern.<sup>3</sup>

Namun, aspek pembiayaan Pendidikan masih menjadi aspek krusial terutama bagi Lembaga Pendidikan dasar dan menengah yang umumnya menggunakan sistem manual dan belum terintegrasi secara digital. Ketergantungan pada sistem manual sering menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan, serta rendahnya transparansi, serta kurangnya efektivitas dalam pengelolaan dana. Yusuf (2023), menunjukkan bahwa inovasi teknologi finansial (*fintech*) mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pendidikan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.<sup>4</sup> Mardiasmo (2021) juga menegaskan bahwa, tata kelola keuangan publik yang baik harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas prinsip yang justru dapat diperkuat melalui digitalisasi sistem pembiayaan pendidikan.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut semakin diperburuk karena perspektif *edupreneurship* yakni pendekatan yang memanfaatkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam pengembangan dan pengelolaan Lembaga Pendidikan belum berkembang secara optimal. *Edupreneurship* mendorong kreativitas, kemandirian finansial, dan inovasi dalam mencari serta mengoptimalkan sumber pembiayaan melalui unit usaha sekolah, kemitraan, digital fundraising, maupun pemanfaatan platform digital lainnya.<sup>6</sup> Minimnya pendekatan *Edupreneurship* tersebut, menyebabkan lembaga pendidikan cenderung pasif dan hanya mengandalkan dana pemerintah atau kontribusi orang tua, tanpa memiliki strategi finansial berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan era digital. Dengan demikian, integrasi antara digitalisasi dan *edupreneurship* menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat basis finansial lembaga pendidikan.

Upaya digitalisasi pembiayaan sejatinya membawa potensi besar bagi penguatan *edupreneurship*. Pemanfaatan teknologi memungkinkan penggalangan dana dilakukan secara real-time, transparan, dan terukur, sekaligus membuka peluang diversifikasi pendanaan melalui inovasi kewirausahaan berbasis digital. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pembiayaan masih menghadapi berbagai hambatan. Nikmatul Hikmah dkk (2024), menegaskan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi kesenjangan infrastruktur dan literasi digital menghambat penerapannya secara merata.<sup>7</sup> Rd. Heri Solehudin (2024) juga menyoroti keterbatasan sumber daya

---

<sup>3</sup> Ayunda Salsabila dan Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam di Era Digitalisasi dan Tantangan Ekonomi Modern," *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol.4, no. 2 (2025), 40.

<sup>4</sup> M Yusuf, "Inovasi Teknologi Finansial (Fintech) dalam Pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan Islam," *Diksi: Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, vol.2, no. 2 (2023), 162.

<sup>5</sup> MBA Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*, 18 ed. (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2021), 27.

<sup>6</sup> Heri Setiawan dkk., "Penguatan Jiwa Edupreneurship Guru untuk Mendukung Kemandirian Sekolah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol.4, no. 1 (2025), 115.

<sup>7</sup> Nikmatul Hikmah dkk., "Digital Transformation In Education Financing: Opportunities And Challenges In The Era Of Technological Disruptions," *ICO EDUSHA*, vol.5, no. 1 (2024), 133.

manusia dan fasilitas teknologi sebagai penyebab ketimpangan tersebut.<sup>8</sup> Temuan tersebut diperkuat oleh Hamdi Abdul Karim dkk. yang menunjukkan bahwa lembaga dengan akses teknologi memadai memiliki pelaporan keuangan lebih transparan dibandingkan lembaga yang masih tertinggal secara digital.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat bahwa kajian terkait digitalisasi pembiayaan pendidikan, akuntabilitas keuangan, dan *edupreneurship* telah dilakukan secara terpisah. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan digitalisasi dengan pendekatan *edupreneurship* sebagai model pembiayaan mandiri lembaga pendidikan. Dengan kata lain, terdapat *research gap* dalam melihat bagaimana digitalisasi dan *edupreneurship* dapat bersinergi untuk memperkuat kemandirian finansial lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana integrasi kedua pendekatan tersebut dapat meningkatkan transparansi, mendorong inovasi pendanaan, serta memperkuat keberlanjutan lembaga pendidikan di era digital yang terus berkembang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis urgensi pembiayaan lembaga pendidikan dalam perspektif *edupreneurship* di era digital. Pendekatan ini dipilih untuk memahami konsep, temuan, dan model pembiayaan yang dibahas dalam berbagai literatur ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan fenomena secara mendalam yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi atau kata-kata<sup>10</sup>

Data penelitian diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelaah dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengkategorikan temuan yang berkaitan dengan digitalisasi pembiayaan, akuntabilitas keuangan, serta konsep *edupreneurship*.

## PEMBAHASAN

### Definisi dan Tujuan Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Urgensi pembiayaan lembaga pendidikan dalam perspektif *edupreneurship* di era digital merujuk pada pentingnya strategi pengelolaan, pengembangan sumber dana pendidikan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kewirausahaan pendidikan (*edupreneurship*) serta teknologi digital.<sup>11</sup> Dalam hal ini, lembaga pendidikan dituntut tidak hanya mengandalkan pembiayaan tradisional seperti dana pemerintah, iuran

---

<sup>8</sup> Rd Heri Solehudin, "The Problematic of Digital Inequality in an Educational Political Policy Perspective," *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol.5, no. 1 (2024), 535.

<sup>9</sup> Hamdi Abdul Karim, "Accountability and Transparency In Education Financing Management," *ICMIE Proceedings*, vol.2 (2025), 260-261.

<sup>10</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, 1 ed. (Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 7.

<sup>11</sup> Munir, "*Kebijakan Pembiayaan Pendidikan*", Bandung: Alfabeta (2020), 45.

peserta didik, atau donasi tetapi juga mengembangkan inovasi finansial berbasis kreativitas, digitalisasi, dan kemandirian ekonomi.<sup>12</sup>

Di era digital, sekolah bisa memanfaatkan berbagai teknologi seperti kelas online, pemasaran digital, pelatihan berbasis internet, hingga pembuatan konten edukasi berbayar sebagai sumber pembiayaan tambahan.<sup>13</sup> Karena itu, pembiayaan menjadi hal yang sangat penting agar lembaga pendidikan dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas layanan, dan tetap mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya.<sup>14</sup> Secara sederhana, pembiayaan dalam perspektif *edupreneurship* di era digital mendorong sekolah untuk lebih mandiri, kreatif, efisien, dan siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi.<sup>15</sup>

Secara umum, pembahasan tentang urgensi pembiayaan lembaga pendidikan dalam perspektif *edupreneurship* di era digital bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya inovasi pembiayaan dan pola pikir kewirausahaan dalam mengelola lembaga pendidikan di tengah perkembangan teknologi.<sup>16</sup>

Beberapa tujuan urgensi pembiayaan lembaga pendidikan dalam perspektif *edupreneurship* di era digital adalah:

1. Menjelaskan pentingnya lembaga pendidikan memiliki strategi pembiayaan yang lebih kreatif, mandiri, dan berkelanjutan untuk menghadapi perubahan kebutuhan operasional dan perkembangan teknologi digital.<sup>17</sup>
2. Mengidentifikasi peran *edupreneurship* sebagai pendekatan baru yang mendorong sekolah atau lembaga pendidikan untuk memanfaatkan peluang usaha dan inovasi berbasis digital.<sup>18</sup>
3. Mendorong lembaga pendidikan melakukan diversifikasi atau penganekaragaman sumber pendanaan, sehingga tidak bergantung pada satu sumber saja seperti dana pemerintah atau iuran siswa.<sup>19</sup>
4. Menguraikan bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan finansial, misalnya melalui pelatihan online, pemasaran digital, platform e-learning, dan pembuatan konten edukatif berbayar.<sup>20</sup>
5. Memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel sesuai prinsip manajemen modern di era digital.

---

<sup>12</sup> Suparlan, "Edupreneurship sebagai Model Kemandirian Lembaga Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 15, No. 2 (2021), 128.

<sup>13</sup> Wahyudi, "Transformasi Digital di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 9, No. 1 (2022), 37.

<sup>14</sup> Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah", Bandung: Remaja Rosdakarya (2019), 62.

<sup>15</sup> Kotler, Philip & Kevin Keller, "Marketing Management", Pearson Education (2016), 89.

<sup>16</sup> Munir, "Kebijakan Pembiayaan Pendidikan", Bandung: Alfabeta (2020), hlm. 42.

<sup>17</sup> Ibid., 45

<sup>18</sup> Suparlan, "Edupreneurship sebagai Model Kemandirian Lembaga Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 15, No. 2 (2021), 128.

<sup>19</sup> Wahyudi, A. "Transformasi Digital di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, (2022), 37.

<sup>20</sup> Kotler, Philip & Kevin Keller, "Marketing Management", Pearson Education (2016), 89.

6. Meningkatkan kesiapan lembaga pendidikan dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi melalui penguatan kompetensi kewirausahaan pendidikan.<sup>21</sup>

### **Kegunaan Pembiayaan Lembaga Pendidikan**

Kegunaan pembiayaan Lembaga Pendidikan dalam perspektif *edupreneurship* di era digital adalah:

1. Menjamin Kelancaran Operasional dan Penyediaan Fasilitas

Pembiayaan lembaga pendidikan berfungsi sebagai penopang utama agar seluruh aktivitas rutin sekolah atau madrasah dapat berjalan tanpa hambatan. Hal ini meliputi beberapa aspek:

- a. Pembiayaan Operasional Harian

Dana pendidikan diperlukan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti gaji guru, tenaga kependidikan, pembayaran listrik, air, internet, serta kebutuhan administrasi seperti alat tulis kantor. Tanpa adanya pembiayaan yang memadai, proses belajar-mengajar akan terhambat, bahkan bisa menurunkan motivasi tenaga pendidik dan siswa<sup>22</sup>

- b. Pemeliharaan dan Penyediaan Fasilitas

Fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta sarana olahraga membutuhkan perawatan rutin. Selain itu, perkembangan teknologi juga menuntut lembaga pendidikan menambah fasilitas baru, misalnya komputer, LCD proyektor, hingga jaringan internet untuk mendukung pembelajaran digital<sup>23</sup>

- c. Penunjang Kegiatan Akademik dan Non-akademik

Pembiayaan juga mencakup kegiatan lain seperti ujian, kegiatan ekstrakurikuler, maupun program pengembangan karakter. Semua ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang kondusif, menarik, dan berdaya saing<sup>24</sup>

Dengan demikian, pembiayaan operasional dan fasilitas tidak hanya menjaga kelancaran proses belajar, tetapi juga meningkatkan mutu lembaga pendidikan secara berkelanjutan.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kegunaan utama pembiayaan dalam lembaga pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dana yang dikelola dengan baik akan berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran, kompetensi guru, sarana prasarana, hingga output lulusan. Berikut penjelasannya:

- a. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Pembiayaan memungkinkan lembaga mengadakan pelatihan, workshop, seminar, serta program sertifikasi guru.

---

<sup>21</sup> Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah" Bandung: Remaja Rosdakarya (2019), 62.

<sup>22</sup> Nursobah, A. (2022). *Manajemen Pembiayaan pada Lembaga Pendidikan Islam*. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, Vol 1, No 1. STAINU Tasikmalaya.

<sup>23</sup> Kolibi, (2024). *Pengelolaan Dana Pendidikan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel*. Kolibi : Jurnal Cendekia, Vol 2

<sup>24</sup> Yeni Fitriani & Kholid Tohiri (2024). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. JJIP : Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran. Vol 1 no 1 hal 24

- 2) Guru yang kompeten akan mampu menyusun metode pembelajaran inovatif, menggunakan teknologi pendidikan, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif.
- 3) Hal ini sejalan dengan pendapat Tilaar (2009) yang menekankan bahwa kualitas guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan.<sup>25</sup>
- b. Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran
  - 1) Dana digunakan untuk pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, termasuk integrasi literasi digital, pendidikan karakter, dan kemandirian belajar.
  - 2) Pembiayaan juga mendukung riset kecil-kecilan di sekolah agar metode pembelajaran lebih relevan.
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Modern
  - 1) Kualitas pendidikan meningkat jika siswa memiliki akses ke fasilitas yang memadai: laboratorium sains, perpustakaan digital, komputer, akses internet, hingga ruang kelas yang nyaman.
  - 2) Sarana ini membuat siswa lebih mudah memahami materi dan meningkatkan keterampilan praktis mereka.<sup>26</sup>
- d. Penguatan Kegiatan Ekstrakurikuler dan Pengembangan Karakter
  - 1) Pembiayaan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga kegiatan non-akademik seperti seni, olahraga, dan organisasi siswa.
  - 2) Hal ini berperan dalam pembentukan karakter, soft skills, dan kepemimpinan siswa.
- e. Peningkatan Mutu Evaluasi dan Akreditasi
  - 1) Lembaga pendidikan membutuhkan biaya untuk memenuhi standar akreditasi, audit mutu, serta penjaminan mutu internal.
  - 2) Dengan akreditasi yang baik, lembaga akan lebih dipercaya masyarakat dan berdaya saing tinggi.

### 3. Mengoptimalkan Perencanaan dan Akuntabilitas

Pembiayaan dalam lembaga pendidikan memiliki kegunaan strategis dalam mengoptimalkan perencanaan dan akuntabilitas, sebab setiap alokasi dana harus melalui tahapan penyusunan anggaran (RKS/RKAS) yang sistematis, pelaksanaan sesuai program, hingga pelaporan serta audit internal maupun eksternal. Perencanaan yang baik menjadikan dana lebih efisien, tepat sasaran, serta sejalan dengan visi misi lembaga, sementara akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, pemerintah, maupun pemangku kepentingan. Dengan demikian, manajemen pembiayaan bukan hanya sekadar teknis pengeluaran dana, tetapi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan menjamin keberlanjutan Lembaga.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Tilaar, H.A.R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Peran Strategis dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 124

<sup>26</sup> Nursobah, A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah*. Moraref Kemenag.

<sup>27</sup> Mulyasa, E. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 48–50

4. Mendukung Keberlanjutan Lembaga Pembiayaan lembaga pendidikan berperan penting dalam menjamin keberlanjutan lembaga karena dana yang stabil dan dikelola dengan baik memungkinkan sekolah atau madrasah mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi. Keberlanjutan ini mencakup kemampuan lembaga untuk terus menyediakan layanan pendidikan, mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, memelihara dan memperbaharui sarana prasarana, serta menjaga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, keberlanjutan finansial mendukung terciptanya inovasi program, diversifikasi sumber pendanaan (misalnya melalui BOS, ZISWAF, CSR, dan usaha mandiri), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tanpa pembiayaan yang terjamin, lembaga pendidikan akan kesulitan bertahan, bahkan berisiko kehilangan daya saing.<sup>28</sup> Oleh karena itu, manajemen pembiayaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan lembaga pendidikan.

#### 5. Memastikan Akses Pendidikan yang Merata

Pembiayaan lembaga pendidikan sangat krusial untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, kaya maupun miskin. Dana pendidikan yang dikelola secara efektif dapat digunakan untuk memberikan subsidi biaya sekolah, beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan sarana prasarana di daerah tertinggal, hingga penyediaan fasilitas belajar yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya pemerataan pembiayaan, lembaga pendidikan mampu mengurangi kesenjangan akses yang disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi sehingga hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dapat terwujud.<sup>29</sup> Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan kebijakan nasional pendidikan, bahwa pendidikan harus dapat diakses secara adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

#### 6. Mengoptimalkan Sumber Dana dan Filantropi

Pembiayaan lembaga pendidikan juga berguna untuk mengoptimalkan sumber dana dan filantropi, yaitu dengan memanfaatkan berbagai potensi pendanaan baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF), dan corporate social responsibility (CSR). Melalui manajemen pembiayaan yang profesional, lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan dana rutin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan dukungan filantropi sehingga tercipta kemandirian finansial yang berkelanjutan. Optimalisasi ini tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan, tetapi juga membuka peluang inovasi program, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung misi pendidikan.<sup>30</sup> Dengan

---

<sup>28</sup> Suryosubroto, B. (2010). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 115–117

<sup>29</sup> Tilaar, H.A.R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Peran Strategis dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 104.

<sup>30</sup> Fitriani, Y., & Tohiri, K. (2024). *Analisis Manajemen Pembiayaan dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Islam (Literature Review)*. **Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam (JIPPP)**,

demikian, pembiayaan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan dan para pemangku kepentingan demi terwujudnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

#### 7. Menegakkan Prinsip Manajemen Keuangan Khusus Pendidikan

Menegakkan Prinsip Manajemen Keuangan Khusus Pendidikan. Pembiayaan lembaga pendidikan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana berjalan sesuai prinsip manajemen keuangan pendidikan, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem pembiayaan yang tertib, lembaga pendidikan dapat mengatur arus kas, menyusun anggaran berbasis kebutuhan nyata, mencegah penyalahgunaan dana, serta menjamin setiap rupiah yang digunakan mendukung tujuan pendidikan. Prinsip ini juga memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, sehingga keberlangsungan dan kualitas pendidikan lebih terjamin

#### 8. Mewujudkan Manfaat Ekonomi dan Sosia

Pembiayaan lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi menjaga kelangsungan sekolah, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Dari sisi ekonomi, dana pendidikan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas lulusan sehingga lebih siap memasuki dunia kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional<sup>31</sup> Misalnya, program pendidikan vokasi yang didukung pembiayaan memadai mampu mencetak tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan wirausaha. Dari sisi sosial, pembiayaan memungkinkan lembaga pendidikan menyelenggarakan program beasiswa bagi siswa kurang mampu, layanan pendidikan inklusif, hingga kegiatan pengabdian masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan bagi orang tua murid. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya berfokus pada internal lembaga, tetapi juga memberi dampak nyata berupa peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penguatan kohesi Masyarakat.

No	Poin Utama	Penjelasan Singkat
1	Operasional & fasilitas	Dana cukup → layanan berjalan lancar
2	Kualitas Pendidikan	Pengelolaan baik → mutu meningkat
3	Perencanaan & akuntabilitas	Proses jelas → dana tepat guna & akuntabel
4	Keberlanjutan Lembaga	Strategi finansial modern → eksistensi terjaga
5	Filantropi & sumber lain	Donasi & zakat → tambahan dana dan program lebih luas
6	Prinsip keuangan spesifik Pendidikan	Fokus misi sosial > profit

<sup>31</sup> Ibid

7	Prinsip keuangan spesifik Pendidikan	Fokus misi sosial > profit
8	Manfaat ekonomi & sosial	Lembaga baik → hasil pendidikan & manfaat sosial

### Urgensi Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Pembiayaan lembaga pendidikan merupakan hal yang penting dalam memastikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di suatu negara. Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi Negara. Pembiayaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang sistem pendidikan di suatu negara. Sumber pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, swasta, dan organisasi internasional.<sup>32</sup>

Banyak lembaga pendidikan Islam, terutama yang bersifat swasta atau berbasis komunitas, sangat bergantung pada dukungan masyarakat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sayangnya, pengelolaan dana dari sumber-sumber tersebut masih sering dilakukan secara kurang optimal, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaporan.<sup>33</sup> Hal ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan dan kredibilitas lembaga pendidikan Islam itu sendiri.

Meski demikian, kondisi nyata di lapangan memperlihatkan bahwa sejumlah lembaga pendidikan Islam, terutama yang dikelola secara mandiri atau berbasis komunitas, masih mengalami kendala dalam aspek pendanaan. Sumber dana tradisional seperti kontribusi siswa maupun donasi masyarakat sering kali belum mampu mencukupi kebutuhan operasional maupun pengembangan lembaga. Situasi ini semakin diperburuk oleh kelemahan dalam sistem perencanaan serta pelaporan keuangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan dari para pihak yang berkepentingan.

Situasi ini menyoroti betapa pentingnya penguatan pengelolaan keuangan dengan menekankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Efisiensi merujuk pada kemampuan institusi dalam memanfaatkan dana yang ada secara optimal dan tepat sasaran, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan keterbukaan serta tanggung jawab dalam penggunaan dan pelaporan setiap anggaran yang dikeluarkan.<sup>34</sup> Dengan menerapkan kedua prinsip ini, kita percaya bahwa kepercayaan masyarakat akan meningkat, sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan pendidikan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Lexy Sutansyah dan Azi Ramdani, "Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi," *Jurnal Pelita Nusantara*, vol.1 No 2 (2023).

<sup>33</sup> Muhammad Fathul Qodir, "Manajemen Keuangan Pendidikan," *Scolae: Journal Of Pedagogy*, vol.4 No 1 (2021).

<sup>34</sup> Puspitawati, "Dampak Implementasi Good University Governance Pada Tata Kelola Keuangan Di Perguruan Tinggi Islam Swasta," *Universitas Islam Sultan Agung*, vol.4 No 1 (2024).

<sup>35</sup> Ayunda Salsabila, Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam di Era Digitalisasi dan Tantangan Ekonomi Modern," *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol.4 No 2 (2025).

## Tantangan dan Solusi Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Banyak lembaga pendidikan menghadapi masalah dalam hal pendanaan sekolah. Salah satu alasannya adalah sumber pendanaan dipertanyakan dan ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sendiri, sehingga pengembangan kreatif diperlukan oleh kepala lembaga pendidikan agar dapat mengatasi masalah ini. Dalam situasi ini, para pimpinan lembaga pendidikan perlu mempunyai strategi cerdas untuk menghindari permasalahan keuangan yang bersifat mendidik, termasuk melalui bisnis, karena jabatan para pimpinan lembaga pendidikan adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Peningkatan usaha bisnis dalam organisasi pendidikan adalah tren terkini yang menjunjung unit pendidikan di berbagai tingkatan. Hal ini tergantung pada kenyataan bahwa jiwa merintis tanpa henti digerakkan oleh para visioner bisnis serta oleh semua individu yang dapat berpikir kreatif dan bertindak secara imajinatif.<sup>36</sup>

Beberapa masalah yang ditemukan oleh orang-orang di daerah pedesaan dengan pusat untuk menurunkan tingkat keuangan yang terkait dengan pendidikan adalah kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas dari sekolah berbasis biaya pendidikan, padahal ada beberapa sekolah berbasis biaya pendidikan yang prestasinya mencengangkan, namun biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Selain itu, dalam era digital, edupreneur dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi dalam merancang model bisnis pendidikan yang relevan dan dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat.<sup>37</sup>

Menurut Josef dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* mengatakan “biaya pendidikan merupakan salah satu komponen input instrumental yang sangat menentukan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.<sup>38</sup> Pendidikan yang bagus dan berkualitas itu mahal, sehingga pendidikan yang berkualitas sulit didapat setelah masyarakat memiliki tingkat keuangan yang lebih rendah dan terpusat.<sup>39</sup> Harga pendidikan akan naik sebanding dengan kualitas sekolahnya.

Lembaga pendidikan global yang secara efektif mengintegrasikan teknologi digital dalam mekanisme pembiayaan, menyoroti perlunya strategi kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta.<sup>40</sup> lembaga pendidikan umumnya hanya mengandalkan sumber pembiayaan tradisional, seperti anggaran

---

<sup>36</sup> Rohiyat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Pratik*, Cetakan 1 (Bandung: Refika Aditama, 2010).

<sup>37</sup> Rada Anjeli, Fita Azzahra, “Tantangan dan Peluang Edupreneurship: Kajian Literatur Di Era Digital,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, vol.2 No 1 (2025).

<sup>38</sup> Josef Pampilaya, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Cetakan 1 (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022).

<sup>39</sup> Dadang Suhardan, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Cetakan 1 (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>40</sup> Sadrakh Zefanya Putra, Shasabila Titanie Harianto, Dan Yabes Christian Matondang, “Analisis Pengaruh E-Commerce: Studi Literatur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umkm,” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, vol.3 No 2 (2023).

dari pemerintah atau dana internal, yang terbatas pada anggaran yang tersedia dan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu strategi pembiayaan dengan bisnis mandiri memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan lembaga. Dengan mengembangkan program kursus berbayar, pendirian unit bisnis pendukung, dan menyediakan layanan konsultasi atau jasa, lembaga pendidikan dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang mereka miliki. Kewirausahaan juga memainkan peran penting dalam mengembangkan generasi yang mandiri, inovatif, dan mudah beradaptasi dalam menanggapi perubahan global.<sup>42</sup> Selain meningkatkan kemandirian keuangan, strategi ini juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mengurangi risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh lembaga pendidikan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan lembaga pendidikan di era digital tidak dapat lagi mengandalkan pola konvensional. Integrasi antara digitalisasi dan edupreneurship menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, serta keberlanjutan finansial lembaga pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional, meningkatkan mutu layanan, memastikan pemerataan akses, mengoptimalkan filantropi, serta memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Meskipun digitalisasi menawarkan peluang melalui fintech, sistem informasi keuangan, dan digital fundraising, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan kualitas SDM. Demikian pula, pendekatan edupreneurship belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai strategi kemandirian dana. Oleh karena itu, diperlukan model manajemen pembiayaan yang menggabungkan teknologi digital dan inovasi kewirausahaan agar lembaga pendidikan mampu mandiri, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan era digital.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. 1 ed. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Ayunda Salsabila, Hamdi Abdul Karim. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam di Era Digitalisasi dan Tantangan Ekonomi Modern." *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol.4 No 2 (2025).

---

<sup>41</sup> Nikmatul Hikmah, "Digital Transformation in Education Financing: Opportunities and Challenges in the Era of Technological Disruption," *The 5th ICO EDUSHA*, vol.5 No 1 (2024).

<sup>42</sup> Azmi, Zul, Saftiara Puspita, and Khoirotun Nikmah, "Edupreneurship dan Akutansi dalam Bisnis: Subuah Kajian Bibliometrik," *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, vol.5 No 1 (2024).

- Azmi, Zul, Saftiara Puspita, and Khoirotun Nikmah. "Edupreneurship dan Akutansi dalam Bisnis: Subuah Kajian Bibliometrik." *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, vol.5 No 1 (2024).
- Dadang Suhardan, dkk. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Cetakan 1. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hikmah, Nikmatul, Niken Lufi Anggini, dan Nur Anim Jauhariyah. "Digital Transformation In Education Financing: Opportunities And Challenges In The Era Of Technological Disruptions." *ICO EDUSHA*, vol.5, no. 1 (2024).
- Josef Papilaya. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Cetakan 1. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022.
- Karim, Hamdi Abdul. "Accountability and Transparency In Education Financing Management." *ICMIE Proceedings*, vol.2 (2025).
- Lexy Sutansyah dan Azi Ramdani. "Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi." *Jurnal Pelita Nusantara*, vol.1 No 2 (2023).
- Mardiasmo, MBA. *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. 18 ed. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2021.
- Muhammad Fathul Qodir. "Manajemen Keuangan Pendidikan." *Scolae: Journal Of Pedagogy*, vol.4 No 1 (2021).
- Nikmatul Hikmah. "Digital Transformation in Education Financing: Opportunities and Challenges in the Era of Technological Disruption." *The 5th ICO EDUSHA*, vol.5 No 1 (2024).
- Puspitawati. "Dampak Implementasi Good University Governance Pada Tata Kelola Keuangan Di Perguruan Tinggi Islam Swasta." *Universitas Islam Sultan Agung*, vol.4 No 1 (2024).
- Rada Anjeli, Fita Azzahra. "Tantangan dan Peluang Edupreneurship: Kajian Literatur Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, vol.2 No 1 (2025).
- Rohiyat. *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Pratik*. Cetakan 1. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sadrakh Zefanya Putra, Shasabila Titanie Harianto, Dan Yabes Christian Matondang. "Analisis Pengaruh E-Commerce: Studi Literatur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umkm." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, vol.3 No 2 (2023).
- Salsabila, Ayunda, dan Hamdi Abdul Karim. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam di Era Digitalisasi dan Tantangan Ekonomi Modern." *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol.4, no. 2 (2025).
- Setiawan, Heri, Fiqra Muhamad Nazib, Imawanty, dan Hari Muharam. "Penguatan Jiwa Edupreneurship Guru untuk Mendukung Kemandirian Sekolah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol.4, no. 1 (2025).
- Sihotang, Donald Harris. "Urgensi Manajemen Pendidikan dalam Menghadapi Era Digitalisasi." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol.8, no. 3 (2025).
- Solehudin, Rd Heri. "The Problematic of Digital Inequality in an Educational Political Policy Perspective." *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol.5, no. 1 (2024).
- Vial, Gregory. "Understanding digital transformation: A review and a research agenda." *SI: Review issue*, vol.28, no. 2 (1 Juni 2019).

Yusuf, M. “Inovasi Teknologi Finansial (Fintech) dalam Pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan Islam.” *Diksi: Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, vol.2, no. 2 (2023).